



Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)

The Role Of Social Services In Distributing Non Cash Food Assistance (Bpnt) (Research At The Social Service In Deli Serdang District)

Aslihal Anwar*, Indra Muda, & Beby Masitho Batubara

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana peranan dinas sosial dalam menyalurkan BPNT dan apa saja kendala dalam menyalurkan BPNT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian, Dinas Sosial berperan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui koordinasi perencanaan, validasi data, penyediaan pendamping, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pengelolaan pengaduan, pembinaan, dan pelaporan. Namun, sosialisasi yang dilakukan kurang efektif dalam menentukan peserta yang tepat. Kendala dalam penyaluran BPNT meliputi ketidaktepatan sasaran, di mana masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria, serta masalah dalam Basis Data Terpadu (BDT) seperti data yang tidak terdaftar. Selain itu, administrasi kependudukan yang kurang lengkap dan keterlambatan bantuan juga menjadi isu.

Kata Kunci: Peranan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Abstract

This research aims to evaluate the role of the Deli Serdang Regency Social Service in distributing Non-Cash Food Assistance (BPNT) and identify the obstacles faced. The problem in this research is focused on the role of social services in distributing BPNT and what are the obstacles in distributing BPNT. This research uses qualitative descriptive methods through interviews, observation and documentation. Based on research, the Social Service plays a role in distributing Non-Cash Food Assistance (BPNT) through planning coordination, data validation, providing companions, socialization, monitoring, evaluation, complaint management, coaching and reporting. However, the socialization carried out was less effective in determining the right participants. Obstacles in distributing BPNT include inaccurate targeting, where there are still recipients who do not meet the criteria, as well as problems in the Integrated Database (BDT) such as data that is not registered. Apart from that, incomplete population administration and delays in assistance are also issues.

Keywords: Role, Non - Cash, Food Aid.

How to Cite: Anwar, A. K. Mudan. I & Batubara, B.M. (2024). Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt)(Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(2) 2024: 68-75,

PENDAHULUAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok ekonomi bawah (Istriawati & Dartanto, 2022; Mubaroq et al., 2023). Program ini dirancang untuk menggantikan program Rastra (beras sejahtera) dan Raskin (beras miskin) yang selama bertahun-tahun menjadi sarana utama penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) (Manao & Eddy, 2013; Sianturi et al., 2021). BPNT berbeda dengan program sebelumnya karena menggunakan mekanisme non tunai, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Sinulingga & Hodriani, 2015; Syerly et al., 2018). Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat-tempat yang telah bekerja sama dengan Bank Himpunan Bank Negara (Himbara), yang kemudian disebut sebagai e-warung (Achmad, 2022; Sianturi et al., 2021).

Pergeseran dari penyaluran bantuan pangan berbasis tunai dan barang (seperti dalam Rastra) menuju penyaluran berbasis non tunai dimaksudkan untuk mengatasi beberapa masalah yang selama ini dihadapi oleh program-program bantuan sebelumnya (Masitoh Sirait, 2020). Salah satu masalah terbesar dalam program Rastra adalah ketidakmampuan untuk memastikan bahwa bantuan sampai pada tangan yang tepat dan digunakan secara benar (Arwanto & Wibawani, 2022; Hardiman Sihombing et al., 2023). Dengan adanya BPNT, pemerintah berharap dapat memperbaiki masalah tersebut, khususnya melalui sistem non tunai yang lebih transparan dan mudah diawasi (Istriawati & Dartanto, 2022; Mubaroq et al., 2023; Yusuf Hanafi Siregar et al., 2023). Program BPNT sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Harniawati et al., 2021; Wibowo, 2020).

Dalam mendukung pelaksanaan program BPNT ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023; PMK, 2019). Peraturan ini menekankan pentingnya transformasi sistem penyaluran bantuan sosial dari tunai menjadi non tunai untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi waktu, serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat (Kadir, 2014; Safii et al., 2019; Sembiring & Agustin, 2023). Presiden RI memberikan apresiasi terhadap program BPNT ini karena terbukti dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam hal pangan (Hia et al., 2021; Oktapiani et al., 2022). Selain itu, program ini juga berfungsi untuk memberikan gizi yang lebih seimbang bagi KPM, mempercepat waktu penerimaan bantuan, dan meningkatkan ketepatan penyaluran kepada penerima yang memang benar-benar membutuhkan.

Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, program BPNT telah diimplementasikan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan populasi sebesar 2.114.627 jiwa pada 2018 (BPS, 2018), penyaluran bantuan sosial seperti BPNT menjadi penting untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala, terutama ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Masih terdapat penerima yang mampu secara ekonomi, sementara yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, menunjukkan masalah dalam pendataan dan verifikasi yang mengurangi efektivitas program dalam membantu keluarga miskin.

Peran Dinas Sosial sangat penting dalam pendataan, verifikasi, dan pemantauan penyaluran BPNT. Namun, perannya belum optimal. Beberapa masalah seperti pendataan yang kurang akurat, kurangnya pengawasan, dan keluhan mengenai distribusi yang tidak merata masih terjadi. Selain itu, kendala dalam hal sumber daya, termasuk kurangnya anggaran, logistik, dan kompetensi sumber daya manusia, menghambat pelaksanaan program. Disposisi dan sikap para pelaksana program juga memengaruhi efektivitas penyaluran BPNT, di mana kurangnya komitmen dan pemahaman mengenai pentingnya ketepatan sasaran dapat memperburuk penyaluran bantuan.

Dari sisi birokrasi, struktur organisasi Dinas Sosial juga perlu berfungsi dengan baik. Ketidajelasan tugas dan prosedur yang rumit dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan, menghambat penyaluran bantuan tepat waktu dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Dinas Sosial dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala

yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penyaluran BPNT, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyaluran BPNT di Kabupaten Deli Serdang di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran Dinas Sosial dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Metode deskriptif bertujuan untuk mempelajari kondisi nyata tanpa adanya intervensi dari peneliti, serta menjelaskan fenomena atau status kelompok, objek, atau kejadian secara rinci sesuai keadaan sebenarnya.

Subjek penelitian ini melibatkan tiga jenis informan yang memiliki peran penting dalam pengumpulan data. Pertama, informan kunci atau key informant, yang memiliki informasi utama, yakni Kepala Seksi bagian identifikasi dan penguatan kapasitas pada bidang penanganan fakir miskin. Kedua, informan utama atau general informant, seperti Kepala Seksi bagian pendampingan pada bidang penanganan fakir miskin, yang terlibat langsung dalam interaksi sosial terkait. Ketiga, informan tambahan, yang meliputi masyarakat penerima dan bukan penerima BPNT di Kabupaten Deli Serdang. Informan tambahan ini adalah warga yang dapat memberikan informasi tambahan meskipun tidak terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi program BPNT.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Wawancara adalah teknik tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi mendalam dari informan melalui percakapan tatap muka. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis yang relevan seperti dokumen, peraturan, atau arsip yang mendukung informasi lapangan.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang diperoleh disederhanakan, diorganisasikan, dan disaring agar relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi, skema, atau tabel, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu interpretasi data hingga menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memberikan gambaran faktual mengenai peran Dinas Sosial dalam menyalurkan BPNT serta kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Deli Serdang

Peran Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memainkan fungsi penting dalam menjamin keberlangsungan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial menjalankan berbagai fungsi mulai dari koordinasi perencanaan, validasi data penerima bantuan, penyediaan pendamping untuk sosialisasi, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. BPNT sendiri merupakan bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Program ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018, disalurkan secara non-tunai melalui rekening bank yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu di gerai e-warong.

Sebagai institusi yang memfasilitasi penyaluran BPNT, Dinas Sosial memiliki peran kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai aturan yang ditetapkan, baik dalam konteks transparansi, efektivitas, maupun ketepatan sasaran. Peran atau jabatan memiliki rangkaian perilaku yang harus dipenuhi, di mana tanggung jawab dan personalitas individu yang menjalankan peran tersebut dapat memengaruhi bagaimana peran dilaksanakan. Oleh karena itu, Dinas Sosial berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pemimpin yang menjamin agar program ini berjalan lancar dan efektif.

Pada aspek koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran, Dinas Sosial berperan dalam merencanakan dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

mendukung pelaksanaan program bansos. Dalam konteks ini, peran interpersonal sangat dibutuhkan. Sebagai pemimpin, Dinas Sosial harus mampu bertindak sebagai penghubung antara instansi pemerintah dan masyarakat, serta sebagai tokoh yang memberikan arahan bagi seluruh pelaksana di lapangan. Sebelum penyaluran bantuan dilakukan, Dinas Sosial melakukan koordinasi internal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan semua persiapan berjalan dengan lancar. Proses koordinasi ini penting karena menjamin bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan terdistribusi dengan baik.

Selain itu, Dinas Sosial berperan dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sebagai instansi yang menangani data penerima bantuan, Dinas Sosial harus melakukan pemutakhiran data yang dikumpulkan dari desa atau kelurahan, bank penyalur, serta tim koordinasi bansos pangan pusat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan selalu akurat dan terkini, sehingga bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak dalam proses pemutakhiran data ini, mulai dari OPD, bank penyalur, hingga kementerian di tingkat pusat. Koordinasi ini dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, bank penyalur, serta Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya, Dinas Sosial juga bertanggung jawab dalam menyediakan pendamping untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan, dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Pendamping sangat dibutuhkan dalam penyaluran BPNT karena mereka merupakan penghubung antara Dinas Sosial dengan masyarakat penerima bantuan di lapangan. Dalam hal ini, Dinas Sosial menjalankan peran yang berhubungan dengan informasi, di mana pendamping memiliki akses langsung ke informasi terkait mekanisme dan aturan penyaluran bantuan. Pendamping ini diutus oleh Kementerian Sosial dan bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga memiliki tugas untuk menjelaskan secara mendalam kepada masyarakat penerima bantuan mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti dalam program BPNT.

Salah satu kegiatan penting lainnya yang dilakukan Dinas Sosial adalah melakukan sosialisasi program kepada jajaran pemerintah daerah, termasuk camat dan lurah, serta kepada masyarakat yang akan menerima bantuan. Melalui sosialisasi ini, Dinas Sosial berharap bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait tujuan program BPNT serta prosedur penggunaannya. Namun, dalam praktiknya, proses sosialisasi seringkali menghadapi kendala. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tenaga pelaksana di desa tidak selalu memilih peserta sosialisasi dengan cermat, sehingga beberapa masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi terkait program BPNT tidak terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tenaga pelaksana di lapangan agar lebih teliti dalam memilih peserta sosialisasi.

Dinas Sosial juga berperan dalam melakukan perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT dengan bank penyalur. Dalam hal ini, Dinas Sosial memegang peran interpersonal, di mana pihak atasan bertindak sebagai penghubung dan pemimpin yang menjaga agar penyaluran bantuan berjalan sesuai perencanaan. Berdasarkan penelitian, meskipun Dinas Sosial cukup menjalankan tugas pemantauan, kegiatan ini masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal kejelasan frekuensi pemantauan dan evaluasi. Pemantauan yang lebih rutin sangat diperlukan untuk memastikan penyaluran BPNT berjalan lancar dan tanpa kendala. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya keterlambatan bantuan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Selain pemantauan, evaluasi juga merupakan bagian penting dari peran Dinas Sosial. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam penyaluran bantuan, seperti keterlambatan atau kendala administratif lainnya. Evaluasi yang rutin akan membantu Dinas Sosial mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini. Misalnya, dalam kasus keterlambatan penyaluran yang diterima oleh KPM, Dinas Sosial harus segera mencari tahu penyebab masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses penyaluran. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, evaluasi ini juga berfungsi untuk mendata ulang dan mengusulkan penerima baru melalui musyawarah desa, sehingga data penerima selalu relevan dan tepat sasaran.

Dinas Sosial juga memiliki tanggung jawab dalam pengadaan pengaduan. Pengaduan ini penting untuk menampung saran atau keluhan dari masyarakat terkait program BPNT. Dalam

konteks pengaduan, Dinas Sosial menjalankan peran interpersonal dengan menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan demikian, pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga kendala yang dialami masyarakat dalam penerimaan bantuan dapat segera diselesaikan. Misalnya, jika ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau tidak ditemukan datanya di lapangan, Dinas Sosial dapat menyampaikan informasi tersebut ke pihak pusat untuk diperbaiki.

Pelaksanaan program BPNT juga melibatkan pembinaan kepada tim koordinasi bansos pangan di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tim pelaksana di lapangan memahami dan melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Sosial memegang peran dalam pengambilan keputusan, di mana pihak atasan terlibat dalam pembuatan strategi pelaksanaan yang efektif dan efisien. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mencakup pelatihan dan pengarahan terkait mekanisme penyaluran bantuan, sehingga program BPNT dapat berjalan sesuai aturan dan tanpa kendala di lapangan.

Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas melaporkan pelaksanaan program BPNT kepada tim koordinasi bansos pangan di tingkat pusat. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran kepada pihak Kementerian Sosial mengenai perkembangan dan hasil dari program BPNT di daerah. Berdasarkan laporan ini, pihak pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah dan memberikan masukan atau bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas program. Laporan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program BPNT di masa mendatang.

Identifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penyaluran BPNT

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Deli Serdang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas program. Identifikasi kendala ini menjadi penting karena memberikan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan keakuratan, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran dari program BPNT. Kendala-kendala ini meliputi aspek administrasi, data, keterlambatan bantuan, kurangnya kelengkapan administrasi kependudukan, serta permasalahan terkait mekanisme distribusi di lapangan. Masing-masing kendala ini berkontribusi terhadap kesulitan yang dialami Dinas Sosial dalam menjamin bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu kendala utama adalah ketidaklengkapan dan ketidaktepatan data penerima bantuan. Data yang digunakan untuk menentukan KPM sering kali berasal dari Basis Data Terpadu (BDT), yang seharusnya mencakup informasi lengkap mengenai calon penerima bantuan di daerah tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi bahwa data yang tersedia tidak sepenuhnya akurat atau up-to-date. Ada calon penerima yang layak tetapi tidak terdaftar dalam BDT, yang berarti mereka tidak dapat memperoleh bantuan meskipun kondisi ekonomi mereka memenuhi syarat sebagai penerima BPNT. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjangkau semua pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan dan mengakibatkan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Bagi masyarakat yang membutuhkan, ketidaktepatan data ini menjadi kendala besar karena mereka kehilangan akses terhadap bantuan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Permasalahan data tidak hanya terbatas pada calon penerima yang tidak terdaftar. Ada juga kendala terkait informasi pribadi penerima yang sering kali tidak akurat atau tidak lengkap, seperti alamat yang tidak jelas atau data keluarga yang sudah tidak relevan, misalnya, keluarga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercantum dalam daftar penerima. Hal ini mengakibatkan tim pendamping BPNT mengalami kesulitan dalam menelusuri keberadaan penerima di lapangan. Dampaknya adalah waktu dan sumber daya yang terbuang untuk mencari penerima yang ternyata sudah tidak ada atau telah pindah tempat tinggal. Masalah ini juga menghambat efisiensi penyaluran bantuan, karena upaya verifikasi data menjadi lebih lama dan kompleks dari yang seharusnya.

Keterlambatan datangnya bantuan dari pusat ke rekening penerima di daerah juga menjadi kendala yang sering dihadapi dalam program BPNT. Dalam penyaluran BPNT, bantuan seharusnya diterima secara berkala setiap bulan, namun sering terjadi keterlambatan yang menyebabkan ketidakpastian bagi para penerima. Bagi masyarakat kurang mampu, bantuan ini merupakan sumber penting untuk memenuhi kebutuhan pangan bulanan, dan keterlambatan penyaluran

sering kali menambah beban mereka. Akibat keterlambatan ini, masyarakat penerima cenderung kesulitan dalam mengatur pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari. Bagi Dinas Sosial, keterlambatan dari pusat ini menjadi tantangan besar, karena mereka sering harus menjelaskan alasan keterlambatan kepada penerima yang bergantung pada bantuan tersebut. Hal ini tidak hanya mempengaruhi citra Dinas Sosial tetapi juga menambah beban kerja mereka dalam menjawab pengaduan dan kekhawatiran dari masyarakat.

Kendala lain yang signifikan adalah ketidaksesuaian antara data kependudukan dan persyaratan administrasi. Banyak calon penerima BPNT yang administrasinya tidak lengkap, misalnya karena tidak memiliki KTP atau KK yang masih berlaku. Keterbatasan administrasi ini menjadi penghalang bagi Dinas Sosial untuk mencatat mereka sebagai penerima yang sah, meskipun kondisi ekonomi mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Dalam beberapa kasus, ada keluarga yang terhambat dalam memperoleh bantuan karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang diminta, seperti bukti tempat tinggal atau surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Bagi masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, administrasi kependudukan yang tidak lengkap sering kali sulit dipenuhi, yang akhirnya menambah beban Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan bantuan bagi mereka.

Tidak hanya dari sisi administrasi, kendala lainnya muncul dalam bentuk penyaluran bantuan yang tidak selalu tepat sasaran. Terkadang bantuan BPNT diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak, sementara masyarakat yang lebih layak menerima malah tidak mendapatkannya. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktepatan atau kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak pelaksana di desa. Dinas Sosial sering kali kesulitan dalam memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, terutama di daerah yang akses informasinya terbatas. Selain itu, proses verifikasi penerima bantuan sering kali melibatkan pihak desa yang tidak selalu memiliki data akurat mengenai kondisi ekonomi warga, sehingga beberapa penerima yang seharusnya tidak layak justru tetap mendapat bantuan. Ketidaktepatan ini mencerminkan kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran agar bantuan lebih tepat sasaran dan efisien.

Kurangnya kapasitas pelaksana di lapangan juga menjadi hambatan yang signifikan dalam program BPNT. Dalam hal ini, tenaga pelaksana di desa sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman prosedur dan aturan program, yang menyebabkan adanya ketidakefisienan dalam penyaluran bantuan. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara pusat dan masyarakat penerima, namun kurangnya pemahaman petugas di desa sering kali menghambat kelancaran program. Kurangnya tenaga terlatih ini juga berdampak pada proses sosialisasi, di mana hanya sebagian masyarakat yang menerima informasi terkait program BPNT. Akibatnya, tidak semua masyarakat kurang mampu memahami persyaratan atau cara mendaftar sebagai penerima bantuan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pembinaan lebih lanjut bagi tenaga pelaksana di tingkat desa agar memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur penyaluran BPNT dan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Dari sisi koordinasi dan komunikasi, Dinas Sosial juga mengalami kendala dalam memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam penyaluran BPNT, termasuk bank penyalur dan tim pusat, memiliki pemahaman yang selaras mengenai tujuan dan prosedur program. Hal ini sering menyebabkan kesalahan informasi atau misinformasi yang dapat menghambat proses penyaluran. Sebagai contoh, ada kalanya data calon penerima yang diserahkan oleh desa kepada Dinas Sosial tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pusat, sehingga perlu dilakukan revisi yang memakan waktu dan tenaga. Dinas Sosial perlu melakukan koordinasi berulang-ulang untuk memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang tidak dapat diabaikan dalam penyaluran BPNT. APBD yang dialokasikan untuk mendukung program bansos di daerah sering kali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional, terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, pemantauan terhadap efektivitas penyaluran bantuan sering kali tidak dilakukan secara rutin, sehingga potensi permasalahan tidak selalu terdeteksi tepat waktu. Kurangnya anggaran juga memengaruhi kemampuan Dinas Sosial untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan yang memadai bagi petugas lapangan, yang berperan penting dalam menjalankan program ini. Pembatasan anggaran ini menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan program BPNT secara efektif dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, identifikasi kendala dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa upaya untuk menjangkau masyarakat kurang mampu tidak selalu berjalan mulus. Dinas Sosial perlu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari administrasi yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, hingga keterbatasan anggaran. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak, terutama dengan pusat dan desa, serta peningkatan kapasitas tenaga lapangan. Perbaikan sistem data, pemahaman administrasi yang lebih baik, serta penguatan anggaran dapat membantu memastikan bahwa program BPNT benar-benar mencapai tujuan utamanya: memberikan bantuan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan efektif bagi mereka yang membutuhkan.

SIMPULAN

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang memegang peran penting dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas ini bertanggung jawab atas berbagai tahapan, mulai dari koordinasi dan perencanaan hingga validasi data, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi program di lapangan. Selain itu, Dinas Sosial memastikan tersedianya pendamping dalam proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan serta berperan dalam pengadaan pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Meskipun Dinas Sosial berupaya menjalankan tugasnya dengan optimal, berbagai kendala menghambat efektivitas program. Kendala utama meliputi data kependudukan yang tidak lengkap, keterlambatan penyaluran bantuan, hingga ketidakakuratan data penerima yang mengakibatkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan terus-menerus untuk memastikan program BPNT dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sehingga bantuan dapat benar-benar mencapai masyarakat yang membutuhkannya.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencakup berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas program. Ketidakeengkapan data, administrasi kependudukan yang tidak akurat, dan ketidaktepatan data penerima menyebabkan beberapa calon penerima yang layak justru tidak mendapat bantuan. Selain itu, keterlambatan penyaluran dari pusat dan keterbatasan anggaran daerah menghambat Dinas Sosial dalam menjalankan pemantauan dan evaluasi rutin. Masalah koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah desa, dan pihak penyalur juga kerap menghambat proses penyaluran bantuan. Kendala-kendala ini menunjukkan pentingnya perbaikan pada sistem data, kapasitas tenaga lapangan, dan alokasi anggaran, serta peningkatan koordinasi agar bantuan BPNT dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.

REFERENSI

- Achmad, N. (2022). Peningkatan dan Optimalisasi Kesehatan Lansia di Masa Pandemi Covid-19 di Binjai melalui Gerakan 3M. *Perspektif*, 11(4), 1382–1386. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6420>
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. *Perspektif*, 11(2), 451–459. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5817>
- Hardiman Sihombing, Humaizi, & Harmona Daulay. (2023). Pengembangan Objek Wisata Pantai dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 12(1), 238–250. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7843>
- Harniawati, W. K., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. *Perspektif*, 10(1), 149–159. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4149>
- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Perspektif*, 12(1), 161–170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Perspektif*, 10(1), 128–139. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>
- Istriawati, N., & Dartanto, T. (2022). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Konsumsi Makanan dan Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1158–1172. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1407>
- Kadir, A. (2014). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 85–107. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi

- %2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Paca rkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Masitoh Sirait, W. A. K. (2020). *Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. 1(2), 99–108.
- Mubarq, M. R., Hakim, L., & Rahman. (2023). Analisis Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia Analysis of Dynamic Relationships of Central and Local Government in Management of The Covid. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 36–45.
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *Perspektif*, 11(3), 1161–1172. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>
- PMK. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, 1–174.
- Safii, S., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 165–175. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i2.153>
- Sembiring, R. A., & Agustin, M. (2023). Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1478>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sei Kambing B. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Sinulingga, F., & Hodriani. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Musik Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 72–86. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.913>
- Syerly, S., Harahap, R. H., & Kardhinata, E. H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1580>
- Wibowo, E. T. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jkn.57285>
- Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito, S., & Ginting, B. (2023). Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. *Perspektif*, 12(1), 185–195. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8465>